

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX (BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS)
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin 22 Januari 2007
Waktu	: Pukul 14.00. – 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Membicarakan Permasalahan PHK terhadap Karyawan Kompas
Ketua Rapat	: Hj. Asiah Salekan, BA / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Anggota yang hadir	: 37 Anggota dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI, 10 orang Ijin,

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI dengan Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) pukul 14.20 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK PEMBICARAAN

Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) merupakan serikat pekerja yang didirikan sejak tahun 1998 di PT. Kompas Media Nusantara (KOMPAS) dan telah tercatat di Depnakertrans dan sejak terbentuknya PKK Bambang Wisudo terpilih sebagai pengurus. Di dalam kepengurusannya Bambang Wisudo diberikan mandat oleh anggotanya untuk menyelesaikan masalah saham 20 % telah ada di PT. Kompas sejak 1980. Saham kolektif ini diwariskan oleh P.K. Ojong selaku pendiri Kompas, melalui PKK dengan gigih memperjuangkan kepemilikan saham kolektif karyawan, proses negosiasi antara PKK dan PT. Kompas berlangsung lama dan sampai sekarang belum membuahkan hasil.

Puncaknya pada bulan Juni 2005 PT. Kompas di tengah-tengah proses negosiasi saham karyawan dialihkan ke perusahaan tanpa persetujuan PKK, secara sepihak manajemen memutuskan bahwa saham kolektif karyawan diubah menjadi pembagian keuntungan (profit sharing) tanpa ada kompensasi dalam bentuk apapun, protes-protes yang diajukan oleh PKK diabaikan oleh manajemen dan berujung pada tindakan PHK terhadap Bambang Wisudo.

III. RANGKUMAN

Setelah mendengarkan pertanyaan/saran dan harapan Anggota serta jawaban dari Koordinator Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) maka sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat menyampaikan dan membacakan beberapa rangkuman rapat sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI akan mempelajari lebih jauh seluruh keterangan dan aspirasi yang disampaikan oleh Tim Advokasi KOMPAS dalam rangka menindaklanjuti upaya penyelesaian masalah.
2. Komisi IX DPR RI meminta kepada Tim Advokasi KOMPAS untuk melengkapi seluruh data dan informasi sebagai bahan pendalaman permasalahan kasus Bambang Wisudo.

Rapat ditutup pukul 15.³⁰ WIB

Jakarta, 22 Januari 2007
Pimpinan Komisi IX DPR-RI
Wakil Ketua,

Hj. Asiah Salekan, BA